

Bahasa Jawa Masuk Sekolah

(Sebuah Kajian Alternatif)

Oleh Ariel Heryanto

1986/1987

Salah satu peristiwa penting, mungkin terpenting, pada tahun ini di Indonesia khususnya di Jawa Tengah, adalah Sarasehan Rerengse Pengajaran Bahasa Jawa, 9-10 Juli 1986 di Semarang. Sarasehan mendesak perlunya pengajaran bahasa Jawa di sekolah-sekolah Jawa Tengah mulai tahun ajaran 1986/1987. Pengajaran itu bersifat wajib, dan akan ikut menentukan lulus atau tidaknya seorang siswa menamatkan suatu jenjang sekolah.

Berikut ini saya ingin menawarkan suatu kajian alternatif terhadap kebijakan tersebut di atas. Pokok kajian saya berpusat pada permasalahan pengajaran suatu bahasa-ibu (bahasa-pertama) di suatu lembaga resmi, seperti sekolah. Tidak peduli apakah itu bahasa Jawa atau bahasa yang lain. Pokok kajian itulah yang pertama-tama akan saya paparkan di bawah ini. Namun karena tulisan ini bertolak dari peristiwa yang langsung menyangkut bahasa Jawa, maka belahan berikut dari tulisan ini juga akan memberikan pertimbangan khusus mengenai pengajaran bahasa Jawa.

Bahasa-Ibu Disekolahkan

Dalam dua tahun terakhir pusat perhatian saya terserap pada masalah kampanye nasional pembinaan "Bahasa Indonesia yang baik dan benar". Kritik bersifat fundamental, bukan teknis, terhadap kampanye tersebut telah saya ajukan dalam beberapa tulisan yang dipublikasikan di luar *Suara Merdeka*. Karena itu, pokok-pokok pikiran saya tentang hal itu perlu diulang secara amat ringkas di sini. Pokok-pokok pikiran itu bertolak dari gagasan beberapa cendekiawan terdahulu, khususnya *Ivan Illich*, *Alton L. Becker*, dan *Raymond Williams*.

Secara gamblang, *Illich* membedakan kontras nasib bahasa-ibu yang hidup dalam berbagai masyarakat lama di dunia dan bahasa-ibu yang diajarkan secara resmi dalam masyarakat-masyarakat modern yang terlibat dalam proses industri komoditi secara intensif.

Bahasa-ibu jenis pertama hidup dalam masyarakat yang berkebudayaan *vernacular*. Bahasa itu bertumbuh dalam masyarakat secara akrab bagi para warganya.

Juga secara "adil" dan merata. Warga masyarakat belajar dari dan untuk menggunakannya dengan sesama warga masyarakat untuk kebutuhan sosial yang langsung dan bermakna sehari-hari. Tidak ada pembakuan berbahasa secara resmi. Tidak ada keseragaman berbahasa secara statis. Kegiatan berbahasa menjadi dinamis, sesuai dengan kepentingan/kebutuhan pihak yang saling berbahasa secara berbeda-beda menurut konteks masing-

masing. Dengan demikian para warga masyarakat memiliki kedaulatan atau kewenangan yang agak merata untuk berperan secara aktif dalam pembentukan dan perubahan bahasa yang bersangkutan.

Situasi "demokratis" demikian menjadi sirna oleh tumbuhnya kekuasaan dari istana yang memonopoli produksi dan kontrol berbahasa dalam masyarakat yang dikuasainya. Dalam bahasa *Illich*, kemampuan dan hak rakyat untuk berbahasa telah dirampas oleh penguasa atau pihak yang dianggap ahli dan diberi mandat oleh penguasa. Rakyat dituntut berbahasa menurut suatu resep atau versi yang ditetapkan dan dibikin secara resmi oleh pemegang monopoli tersebut. Bahasa yang "resmi" telah menjadi suatu produk komoditi. Untuk saling berbahasa dan bermasyarakat, rakyat kini harus bergantung pada keputusan dari "atas". Rakyat tidak lagi menjadi produser, tetapi konsumen yang menadah komoditi dari "atas" itu untuk menyusun pikiran/perasaan, untuk berkomunikasi secara verbal, dan menata hubungan sosial dengan sesamanya.

Studi dan analisa *Illich* dimulai dengan kajian atas peristiwa di Spanyol pada akhir abad 15, serta relevansinya untuk berbagai masyarakat modern. Pengembangan Bahasa Indonesia sejak kemerdekaan juga disinggung oleh *Illich* sepintas. Peristiwa abad 15 di Spanyol itu merupakan salah satu awal sejarah pembinaan resmi bahasa "baik dan benar" oleh penguasa tertinggi dalam masyarakat. Hal itu dikerjakan dengan sadar dan sengaja untuk menjajah rakyat di tanah air sendiri. Pihak penguasa sadar bahwa pertumbuhan bahasa dan kekuasaan kerajaan tidak terpisahkan. Keduanya bertumbuh, berkembang, dan runtuh bersama-sama dalam berbagai bangsa di sepanjang sejarah. Karena itulah monopoli pembentukan dan perubahan berbahasa dimaksudkan sebagai penggenapan dan pelestarian kekuasaan Ratu atas rakyatnya.

Apa yang terjadi di Indonesia, minimal dalam satu dasawarsa terakhir, dapat diperbandingkan dengan apa yang terjadi di Spanyol 5 abad yang lampau itu. Bahasa nasional kita berkembang sebagai semacam komoditi yang diproduksi secara monopolistik oleh suatu kekuasaan resmi kenegaraan. Kaum elit sekolah di Indonesia menjadi semakin gagah untuk berbahasa secara otentik. Mereka menjadi konsumen penadah yang antri berkonsultasi pada kaum "ahli" profesional tentang bagaimana berbahasa secara "baik dan benar". Tetapi, berbeda dari kejadian di Spanyol, pada pemegang monopoli produksi bahasa Indonesia tampaknya ti-

dak sengaja dan/atau tidak sadar akan dampak ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh upayanya. Mereka mungkin tidak berniat jahat. Justru sebaliknya, mereka bekerja keras secara patriotik, berupaya memberikan sumbang-an terhadap pertumbuhan bangsanya.

Perlu ditekankan sekali lagi di sini bahwa uraian di atas bersifat sangat sederhana dan ringkas. Pemahaman yang lebih dalam menuntut uraian lebih rinci yang tak mungkin tertampung dalam tulisan di sini. Bagaimana pun juga, pokok-pokok masalah di atas perlu diungkapkan untuk memperjelas perspektif alternatif yang ingin saya ajukan dalam kajian atas peristiwa di Jawa Tengah itu.

Penting dan Menarik

Hasil sarasehan tersebut di depan sangat penting dan menarik. Tidak saja karena isi kebijakan yang dirumuskannya. Tetapi juga karena kekuatan resminya. Sarasehan itu disponsori dan diikuti oleh pihak-pihak yang paling berpengaruh dalam menentukan kebijakan pengajaran sekolah-sekolah di Jawa Tengah. Tidak ada satu pun penyanggah di antara mereka. Satu-satunya penyanggah datang dari Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang hadir dalam sarasehan sebagai penceramah tamu. Ketegangan lebih jauh mengenai sarasehan itu dapat dibaca dari laporan pada halaman terakhir harian *Suara Merdeka*, 10 dan 11 Juli 1986. Berdasarkan sumber yang sama, kajian berikut ini disusun.

Setidak-tidaknya ada dua pokok masalah terpenting yang patut dikaji secara lebih mendalam dari hasil sarasehan tersebut. Pertama, alasan diadakannya hasil sarasehan itu ialah "untuk melestarikan bahasa Jawa". Kedua, sasaran diselenggarakannya pelajaran wajib bahasa Jawa itu adalah para siswa bersuku Jawa sendiri. Berikut ini kita bahas kedua masalah itu satu per satu, walau keduanya erat berkaitan.

Pemikiran "melestarikan bahasa Jawa" sebenarnya tidak diungkapkan sendirian. Tetapi diikuti pula oleh serangkaian pemikiran pendukung. Misalnya, ada yang mengacu pada pasal 36 UUD '45 tentang hak dan legitimasi menghormati serta memelihara bahasa daerah. Yang lain, mengungkapkan peluang untuk memanfaatkan kebijakan baru pemerintah mengenai "muatan lokal" dalam kurikulum sekolah di berbagai daerah. Yang tak kalah pentingnya ialah kekhawatiran berbagai pihak akan "erosi kebudayaan" dari luar yang akan membuat bahasa Jawa "punah". Sehingga orang Jawa kelak harus belajar berbahasa Jawa dari para ahli asing. Semua pemikiran pendukung itu pada intinya meleng-

kapi pengabsahan hasil sarasehan yang diajukan di atas.

Gairah untuk "melestarikan" bahasa Jawa serta kekhawatiran akan "punah"-nya bahasa itu layak dikaji secara khusus. Yang menjadi masalah utama *bukan*nya apakah kita perlu menyesali punahnya suatu budaya tradisi dalam zaman modernisasi ini, seperti yang dipertanyakan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Itu persoalan tersendiri. Masalah yang lebih relevan dan hadir secara nyata saat ini ialah: benarkah bahasa Jawa sedang sekarat dan mendekati kematiannya, seperti yang dikuatirkan banyak pihak? Jika ya, mengapa justru pada saat yang bersamaan kita sering mendengar tuduhan akan "Jawaniisasi" kebudayaan dan politik nasional di Indonesia saat ini?

nonjol tentang hal ini.

Tapi kebudayaan nasional Indonesia tidak diisi secara mutlak oleh kebudayaan tradisional "Jawa Priyayi" belaka. Betapa pun kuatnya pengaruh kebudayaan tersebut. Budaya industrial-efisiensi-Barat juga telah dengan gencar merajalela dalam himpunan kebudayaan Indonesia yang kita sebut kebudayaan "nasional". Dari kebudayaan yang belakangan inilah, kebudayaan Jawa Priyayi mendapatkan saingan keras. Sanggahan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa terhadap konsensus sarasehan mungkin dapat dipahami dalam perspektif ini. Karena itulah keluhan kaum elit Jawa tentang "erosi kebudayaan" adiluhung dapat dipahami secara lebih baik. Pasal 36 UUD 45 tidak sekedar melindungi kebudayaan daerah, seperti yang telah disebut sepenggal oleh laporan *Suara Merdeka* dari sarasehan tersebut di atas. Pasal itu menyebutkan perlindungan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya kebudayaan nasional. Jadi bukan pengembangan kebudayaan daerah demi kebudayaan daerah itu sendiri.

Kekhawatiran bahwa suku Jawa pada generasi mendatang terpaksa belajar berbahasa Jawa dari para ahli asing sebenarnya kurang berdasar, dan bisa menyesatkan. Jika benar bahasa Jawa tidak dipelajari lagi oleh kaum mudanya, dan dilepaskan menjadi bahan keasyikan studi ilmiah para ahli asing, maka itu berarti tidak ada keterpaksaan atau keharusan bagi kaum muda Jawa untuk mempelajarinya. Itu berarti bahasa tersebut bukan lagi bahasa Jawa, tetapi *bekas* bahasa Jawa. Ia menjadi bahasa yang mati, disimpan di buku-buku perpustakaan di negeri asing. Bukan bahasa yang dihidupi dan menghidupkan orang-orang Jawa. Bahasa itu hanya menjadi komoditi dalam dunia keilmuan kaum profesional.

Masalah paling belakangan ini menghantar kita pada pokok kedua dari sarasehan tersebut yang perlu disorot secara khusus: para siswa suku Jawa sebagai sasaran pengajaran bahasa Jawa di sekolah. Ini menarik, sebab para siswa bersuku Jawa itulah pemilik sejati bahasa Jawa sebagai bahasa ibu. Sekarang mereka perlu diajar di sekolah berbahasa ibu mereka sendiri, oleh guru profesional, dan untuk menentukan jenjang sekolah mereka!

Kebijakan sarasehan itu mengandaikan dua hal. Pertama, akan-akan para siswa Jawa itu tidak/belum/kurang mampu berbahasa Jawa jika tidak diajar di sekolah. Kedua, para siswa Jawa itu perlu/harus memiliki kemampuan berbahasa Jawa seperti yang diajarkan di sekolah. Benarkah kedua asumsi itu?

Menurut pengamatan dan

pengetahuan terbatas yang saya miliki, para siswa Jawa di Jawa Tengah bukannya tidak/belum/kurang mampu berbahasa Jawa. Seperti para nenek-moyangnya, mereka memiliki kemampuan itu. Dan kemampuan itu tidak dipelajari di sekolah dari seorang ahli/pengajar profesional. Kemampuan itu mereka dapatkan dari hidup bermasyarakat dengan sesama. Mungkin yang masih dipermasalahkan oleh para peserta sarasehan tadi ialah bahwa bahasa Jawa kaum muda Jawa itu merupakan bahasa Jawa yang "rusak", sebagaimana telah sering kita dengar sebelum berlangsungnya sarasehan. Yakni bahasa yang tidak se"baik" dan se"benar" bahasa yang hendak diresmikan dan dibakukan sekolah. Dengan demikian, kasusnya seperti nasib sastra berbahasa Jawa yang telah dibahas oleh G. Quinn tersebut di atas. Sesuatu yang hidup segar-bugar dianggap tidak ada atau sedang mendekati kematian.

Sarasehan yang sama, menurut laporan *Suara Merdeka*, mengeluh karena sangat kurangnya guru bahasa Jawa yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan baru mereka. Ini memperkuat penafsiran saya di atas, bahwa "bahasa Jawa" yang dibicarakan secara ideal oleh sarasehan itu bukanlah bahasa Jawa yang hidup segar-bugar dalam masyarakat Jawa masa kini. Tapi suatu versi (resmi) "bahasa Jawa" yang sangat langka kehadirannya dalam masyarakat Jawa sendiri. Jika seperti itu bahasa yang hendak diajarkan di sekolah, patut dipertanyakan secara kritis: benarkah para siswa Jawa itu membutuhkan pelajaran bahasa tersebut? Yang jelas, kebutuhan itu bukan untuk kehidupan bermasyarakat Jawa sehari-hari. Tapi kebutuhan akan suatu kerja profesional keilmuan, persis kebutuhan para ahli asing kita. Dengan kata lain, pelajaran semacam itu akan mengasingkan kaum muda Jawa dari kehidupan *vernacular* masyarakat yang paling mereka akrabi.

Masih ada sederet masalah yang menarik dari sarasehan itu. Tapi tulisan ini sangat terbatas, dan tak mungkin menampungnya.

Pada hakikatnya, saya yakin para peserta dan sponsor sarasehan itu berniat mulia dalam usaha "melestarikan bahasa Jawa". Tetapi sebagai pecinta bahasa dan budaya Jawa yang hidup, saya kuatir usaha mulia itu keliru melangkah. Langkah yang akan ditempuh justru akan mempercepat kematian bahasa itu sendiri.

Memang, hanya kematianlah yang bersifat lestari dan abadi. *

— Ariel Heryanto, staf pengajar di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Apa yang sebenarnya terjadi, menurut keyakinan saya, bukanlah sekedar "Jawanisasi", juga bukan gejala-gejala akan segera punahnya Bahasa Jawa. Hasil penelitian George Quinn tentang sastra Jawa modern memberikan bahan masukan yang penting untuk kita kaji di sini. Sementara kebanyakan ahli Jawa, baik yang berdarah Jawa sendiri maupun asing, menilai bahwa sastra berbahasa Jawa sedang sekarat, Quinn justru membuktikan kenyataan yang sebaliknya. Kesimpulannya: belum pernah dalam seluruh sejarahnya, sastra berbahasa Jawa bertumbuh subur atau sehebat saat ini (paling sedikit) ditinjau dari segi jumlah penulis, karya sastra, dan publik sastra itu.

Jadi apa yang telah membutakan pandangan para ahli tentang Jawa itu terhadap kenyataan pertumbuhan memuncak sastra berbahasa Jawa itu? Quinn mengajukan tiga alasan pokok. Pertama, ideologi nasionalisme Indonesia telah mengungguli dan sekaligus melumpuhkan pertumbuhan budaya daerah/suku, termasuk Jawa. Kedua, dominasi nilai priyayisme dalam masyarakat Jawa telah mengingkari kehadiran dan nilai karya-karya sastra mutakhir berbahasa Jawa yang tidak kepriyayi-priyayan itu. Ketiga, sistem kewenangan dalam dunia keilmuan tentang Jawa (seperti pada bidang lain) cenderung memaksa orang untuk hanya berkuat dan mengutip-ngutip pendapat ahli terdahulu secara turun-temurun. Padahal pendapat itu keliru. Peneliti yang belakangan tidak berani curiga pada pendapat ahli-ahli yang paling terkemuka dan secara langsung turun ke lapangan untuk mengamati kenyataan yang hidup.

Keluhan masyarakat non-Jawa terhadap gejala "Jawanisasi" di Indonesia barangkali akan lebih tepat dipahami sebagai keluhan terhadap "Jawa-Priyayinisasi". Artinya, bukan hanya kaum non-Jawa di Indonesia yang mendapatkan persaingan keras dalam percaturan kebudayaan nasional. Tetapi juga kaum Jawa yang tidak berorientasi ke nilai priyayi Jawa. Corak ke-Krama-kramaan dalam perkembangan mutakhir bahasa dan budaya nasional telah memberikan ilustrasi yang me-